



PELINDUNGAN RAJA AMPAT SEBAGAI DESTINASI EKOWISATA

Lisnawati*

Abstrak

Raja Ampat di Papua Barat merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia dan berpotensi besar sebagai destinasi ekowisata unggulan. Namun, kawasan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti ancaman pertambangan, pariwisata massal, rendahnya kesadaran konservasi, serta infrastruktur dan kelembagaan yang belum optimal. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji strategi perlindungan ekosistem Raja Ampat melalui pendekatan ekonomi berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan perlunya strategi ekonomi terintegrasi yang mencakup regulasi ketat, pembatasan wisatawan, pelibatan masyarakat lokal, serta penguatan kelembagaan dan infrastruktur hijau. Ditekankan bahwa diversifikasi ekonomi dan riset berkala mendukung efektivitas kebijakan. Komisi VII DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk melakukan perlindungan Raja Ampat sebagai destinasi ekowisata melalui pengawasan dan penguatan regulasi. Melalui fungsi pengawasannya, Komisi VII DPR RI dapat memastikan implementasi regulasi ketat terhadap kegiatan ekstraktif yang berpotensi merusak lingkungan. Keberhasilan pengelolaan ekowisata di Raja Ampat memerlukan kolaborasi multisektor untuk menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, dan Raja Ampat merupakan salah satu contoh terbaik dari keanekaragaman tersebut. Kawasan Raja Ampat terletak di Provinsi Papua Barat dan terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil yang menyajikan pesona alam bawah laut dengan ekosistem yang unik dan kaya (wikipedia, 2025).

Pariwisata berbasis alam atau ekowisata telah menjadi sumber pendapatan utama bagi daerah yang memiliki kekayaan alam seperti Raja Ampat. Hal ini dikarenakan meningkatnya minat wisatawan global terhadap destinasi yang menawarkan keindahan alam yang autentik sekaligus praktik pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Keindahan alam bawah laut Raja Ampat, dengan lebih dari 1.500 jenis ikan dan 600 spesies karang, menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun internasional (Mangubhai et al., 2012).

Di sisi lain, pertumbuhan ekowisata yang pesat ini juga membawa berbagai tantangan yang harus segera diatasi untuk memastikan kelestarian lingkungan serta keberlanjutan ekonomi lokal. Ancaman terhadap lingkungan Raja Ampat datang dari pariwisata yang tidak terkendali dan kegiatan ekonomi ekstraktif, seperti pertambangan.

*) Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: lisnawati@dpr.go.id

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan Raja Ampat sebagai destinasi ekowisata menjadi vital secara ekonomi. Tulisan ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan strategi penyelesaiannya. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan ekowisata di Raja Ampat tidak hanya mampu memberikan manfaat ekonomi yang optimal tetapi juga berkontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan.

Tantangan Pelindungan Ekowisata Raja Ampat

Tantangan utama dalam pelindungan ekowisata Raja Ampat adalah tekanan dari kegiatan ekonomi alternatif, khususnya pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam. Izin pertambangan yang pernah diberikan di kawasan ini menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan yang menjadi aset utama ekowisata (Agardy et al., 2011). Selain itu, tantangan lain terlihat dari peningkatan jumlah wisatawan yang berpotensi melebihi kapasitas daya dukung lingkungan, yang dapat mengarah pada degradasi ekosistem yang menjadi sumber daya tarik wisata (Walpole & Goodwin, 2000).

Di sisi lain, kurangnya kesadaran masyarakat lokal tentang pentingnya konservasi lingkungan, yang terkadang menyebabkan praktik penangkapan ikan yang merusak seperti penggunaan bom dan racun ikan (Costa, 2022). Kondisi ini tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem laut, tetapi juga mengurangi daya tarik Raja Ampat.

Dari sisi infrastruktur, di Raja Ampat sangat terasa belum memadai. seperti kurangnya fasilitasi sanitasi, pengelolaan limbah, dan akses transportasi yang terbatas (Toyiban, 2020). Hal ini berdampak negatif terhadap pengalaman wisatawan sekaligus meningkatkan potensi pencemaran lingkungan.

Kelembagaan juga menjadi hambatan dalam pengelolaan ekowisata. Koordinasi yang kurang optimal antar lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sering kali menyebabkan konflik kepentingan dan hambatan birokrasi yang menghambat efektivitas kebijakan pelindungan lingkungan (Nuraini, N et al., 2021). Dari sisi ekonomi, ketergantungan yang tinggi pada sektor ekowisata berisiko menciptakan kerentanan ekonomi jika terjadi gangguan eksternal seperti pandemi global, perubahan iklim ekstrem, atau ketidakstabilan politik, dapat menurunkan jumlah wisatawan secara drastis.

Strategi Ekonomi Terintegrasi

Terdapat beberapa strategi ekonomi yang terintegrasi untuk mengatasi tantangan tersebut. *Pertama*, pemerintah perlu menerapkan regulasi ketat sehubungan dengan aktivitas pertambangan dan kegiatan lain yang berpotensi merusak lingkungan. Kebijakan pencabutan izin tambang yang baru ini diambil merupakan langkah tepat untuk melindungi kelestarian alam sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi jangka panjang dari sektor ekowisata (Raja Ampat Government, 2025). *Kedua*, strategi pengelolaan jumlah wisatawan harus diterapkan secara tegas melalui kebijakan kuota kunjungan wisatawan, agar aktivitas pariwisata tidak melampaui batas daya dukung lingkungan.

Ketiga, pelibatan aktif masyarakat lokal dalam kegiatan ekowisata dapat memperkuat ekonomi lokal sekaligus mendorong konservasi lingkungan. Program pelatihan bagi penduduk lokal mengenai keterampilan wisata berkelanjutan serta pemberian insentif ekonomi berbasis konservasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan (Honey, 2008). Strategi *keempat*, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan yang mampu mendukung aktivitas ekowisata secara berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan sistem pengelolaan limbah terpadu (Buckley, 2011).

Kelima, memperkuat kelembagaan lokal melalui koordinasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta guna memastikan kebijakan ekowisata dapat berjalan efektif (RRI, 2025). *Keenam*, diversifikasi produk ekowisata, seperti wisata budaya dan edukasi lingkungan, dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam sekaligus menciptakan pengalaman wisata yang lebih bervariasi dan berkelanjutan. *Ketujuh*, strategi riset dan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi dampak ekowisata perlu diterapkan untuk memastikan kebijakan yang dijalankan tetap relevan dan efektif. Selain ketujuh strategi di atas, pemerintah perlu mengembangkan program investasi berkelanjutan untuk menarik investor yang berkomitmen pada pelestarian lingkungan serta meningkatkan akses pasar bagi produk lokal, seperti kerajinan dan produk pangan, agar manfaat ekonomi dapat lebih luas dirasakan oleh masyarakat setempat.

Penutup

Pelindungan ekowisata Raja Ampat menghadapi tantangan serius, seperti ancaman pertambangan, lonjakan wisatawan, lemahnya infrastruktur, dan koordinasi kelembagaan yang minim. Ketergantungan pada sektor wisata juga memperbesar risiko ekonomi lokal. Untuk mengatasinya, dibutuhkan strategi ekonomi terintegrasi yang mencakup regulasi ketat terhadap aktivitas merusak lingkungan, pengelolaan daya dukung wisata, pelibatan masyarakat, dan penguatan kelembagaan. Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan dan diversifikasi ekonomi lokal menjadi langkah penting menuju keberlanjutan.

Komisi VII DPR RI berperan penting dalam melindungi Raja Ampat melalui penguatan regulasi pertambangan dan lingkungan hidup. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VII memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan alokasi anggaran konservasi yang memadai. Komisi ini juga perlu mendorong kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, serta berperan sebagai fasilitator dalam menyelesaikan konflik kepentingan dan mendukung penguatan kelembagaan pelestarian lingkungan.

Referensi

- Agardy, T., di Sciara, G. N., & Christie, P. (2011). Mind the gap: Addressing the shortcomings of marine protected areas through large scale marine spatial planning. *Marine Policy*, 35(2), 226–232. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2010.10.006>
- Buckley, R. (2011). *Tourism and environment*. Springer.
- Costa, Fabio Maria Lopes. (2022, 18 Januari). Raja Ampat rawan pengeboman ikan. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/bebas-akses/2022/01/18/rawan-pengeboman-ikan-di-raja-ampat>
- Gustiarini, A., Tampubolon, N., Saranga, N., & Mustiah, D. (2023). Sustainable marine tourism of eco resort criteria South Waigeo Raja Ampat Islands. *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*, 7(3), 273–282. <https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2023.Vol.7.No.3.317>.
- Honey, M. (2008). *Ecotourism and sustainable development: Who owns paradise?* Island Press.
- Mangubhai, S., Erdmann, M. V., Wilson, J. R., Huffard, C. L., Ballamu, F., Hidayat, N. I. & Rotinsulu, C. (2012). Papuan bird's head seascape: Emerging threats and challenges in the global center of marine biodiversity. *Marine Pollution Bulletin*, 64(11), 2279–2295. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2012.07.024>
- Nuraini, N., Satria, A. A., Wahyuni, E., & Bengen, D. G. (2021). Access justice and strengthening the institutional performance of marine ecotourism management in Raja Ampat, Indonesia. *Journal of Sustainability Science and Management*, 16(8), 268–288. <https://doi.org/10.46754/jssm.2021.12.020>
- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. (2025). Regulasi pencabutan izin tambang di Raja Ampat. *Dokumen Resmi Pemerintah Daerah*.
- RRI. (2025, Juni 8). Langkah strategis Kemenpar tangani isu tambang Raja Ampat. *Radio Republik Indonesia*. <https://rri.co.id/nasional/1570453/langkah-strategis-kemenpar-tangani-isu-tambang-raja-ampat>
- Toyiban. Pembangunan infrastruktur di Raja Ampat terkendala status kawasan. *Antaraneews.com*. Pembangunan infrastruktur di Raja Ampat terkendala status kawasan - ANTARA News
- Wikipedia contributors. (2025, Juni 25). *Kepulauan Raja Ampat*. *Wikipedia bahasa Indonesia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Raja_Ampat
- Walpole, M. J., & Goodwin, H. J. (2000). Local economic impacts of dragon tourism in Indonesia. *Annals of Tourism Research*, 27(3), 559–576. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(99\)00088-2](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00088-2)